

BAB III

KEBIJAKAN LUAR NEGERI FILIPINA TERHADAP AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016-2018

Sejak terpilihnya sebagai Presiden Filipina, Duterte sudah menunjukkan gelegat bahwa Ia bukanlah sosok yang mau didikte dan tunduk pada arahan siapapun. Hal tersebut juga sudah terlihat sejak Duterte menjabat sebagai Walikota Davao, Ia selalu menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang sedang pemerintahannya hadapi. Ketika masa kampanye pemilihan Presiden Filipina tahun 2016, Duterte menjanjikan hal-hal yang bersifat populis untuk meraih simpati rakyat. Salah satunya yaitu pemberantasan Narkoba di Filipina, hal yang kemudian banyak mendapatkan kritikan dari dunia internasional salah satunya dari AS Karen cara yang digunakan Duterte dianggap melanggar HAM. Selain itu, langkah yang diambil Duterte dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan dengan Tiongkok juga menjadi kebijakan yang mengganggu hubungan Filipina dan AS. Di BAB III ini penulis akan menjabarkan tentang kebijakan-kebijakan luar negeri Filipina di era Pemerintahan Duterte yang mengganggu keharmonisan hubungan bilateral Filipina dan AS.

A. Duterte Abaikan Kritik AS Terhadap Kebijakan *War on Drugs*

Salah satu janji kampanye Duterte yang langsung terlihat nyata pelaksanaannya adalah *War on Drugs* atau perang melawan Narkoba. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa narkoba menjadi musuh utama di Filipina. Selain menyebabkan meningkatnya kejahatan, tetapi narkoba secara tidak langsung juga merusak generasi muda Filipina. Oleh karena alasan tersebut, Duterte menjanjikan

program ini jika menjadi Presiden Filipina. Namun pada praktiknya kebijakan ini juga tidak mudah mencari solusi terbaiknya dan malah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

1. Kritik AS Terhadap Kebijakan *War on Drugs*

Setelah dilantiknya Duterte sebagai Presiden baru Filipina bulan Juni 2016, dimulailah penerapan Kebijakan *War on Drugs* ala Duterte. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan bahwa jumlah korban yang tewas dibunuh lantaran terkait dengan narkoba mencapai 1.800 orang. Jumlah ini meningkat dua kali lipat sejak Duterte resmi mengambil alih kekuasaan pada Juni 2016 dan memulai perang anti-narkotika (*war on drugs*) di Filipina. Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa, seperti dikutip situs Reuters, Senin, 22 Agustus 2016, mengatakan pihaknya tengah menyelidiki 1.067 pembunuhan terkait perang terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang. Pihak Kepolisian Filipina telah menindak setidaknya 712 orang, baik pengedar maupun pengguna narkoba, selama operasi pemberantasan Narkoba, hal tersebut disampaikan Ronald Dela Rosa kepada Komite Senat Filipina.

Sebelumnya, berdasarkan data aktivis Hak Asasi Manusia yang dikutip Reuters, jumlah korban tewas terkait perang narkoba sampai dengan 3 Agustus 2016 mencapai 770 orang. Jumlah itu masih akan terus bertambah karena sikap Duterte yang tak tebang pilih dalam memberantas kejahatan narkoba membuat warganya hormat kepada pria yang 22 tahun memimpin kota Davao tersebut. Akibat aksi brutal Duterte tersebut organisasi negara-negara dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) angkat bicara. Organisasi internasional itu telah mendesak Duterte untuk menghentikan eksekusi ekstra-yudisial dan pembunuhan yang telah meningkat sejak Duterte

terpilih menjadi Presiden Filipina dan memenuhi janji untuk menghapus kartel narkoba di Filipina.

Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Ronald Dela Rosa kembali menegaskan saat ini negaranya sedang dalam peperangan besar melawan narkoba. Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan seluruh jajaran kepolisian di wilayah Luzon, Filipina. Ia menyampaikan bahwa Kepolisian Filipina harus mendorong semangat mereka untuk melakukan pekerjaan yang sedang Duterte lakukan karena saat ini Filipina sedang berperang kata Dela Rosa, seperti dilansir situs Reuters, Selasa, 4 Oktober 2016. Ia mengatakan hal ini harus dia lakukan untuk membakar semangat anggotanya. Selain itu, Dela Rosa juga menyebut hal ini dilakukan untuk memberitahu seluruh anggota Kepolisian Filipina soal situasi yang terjadi di negara mereka. Pada September 2016, Dela Rosa sempat membuat heboh dengan mendorong pengguna obat bius dan narkoba untuk membunuh bandar narkoba yang telah menjadi kaya dari mengeksploitasi orang-orang miskin.

Berikut ini 5 (lima) hal terkait perang narkoba, yang menjadi program kampanye Duterte dan dilaksanakan sejak dia terpilih pada Juni 2018 menurut temuan *Human Rights Watch (HRW)*, pada 2017:

1. Jumlah korban tewas perang narkoba sejak program itu digelar ketika Presiden Rodrigo Duterte terpilih pada 30 Juni 2016 mencapai sekitar 7000 orang. Operasi ini disebut "*Operation Double Barrel*". Jauh diatas jumlah versi resmi yaitu sekitar 4.800 orang.
2. Operasi ini kerap diwarnai dengan tindakan pembunuhan semena-mena atau *extrajudicial killing* oleh polisi atau tentara dengan alasan bandar dan pemakai narkoba mencoba melawan. Operasi ini kerap

menyasar daerah kumuh di ibu kota Manila namun juga masuk ke kawasan urban.

3. Saksi mata justru melihat korban tewas ditembak dalam keadaan tidak melawan dan tidak bersenjata. Agar terlihat benar dimata hukum, HRW menemukan adanya upaya menutup-nutupi dengan menaruh senjata, amunisi telah terpakai, dan paket narkoba pada tubuh korban.
4. Sebelum menjadi Preisden Filipina, Duterte pernah menjabat sebagai Wali Kota Davao selama sekitar dua puluh tahun. Di kota ini ada kelompok dengan nama "*Davao Death Squad*" yang telah membunuh ratusan para pengguna narkoba, anak-anak dan kriminal kecil-kecilan. Meski mengaku tidak mendukung skuad pembunuh ini, Duterte terang-terangan mengatakan ini diperlukan untuk mengatasi kejahatan yang membuatnya mendapat julukan "*Duterte Harry*".
5. Sebelum menjadi Presiden, Duterte pernah mengatakan dia berupaya mengatasi kejahatan dengan mengeliminasi para penjahat. Jika Tuhan menaruh Ia di posisi itu (sebagai Presiden), hati-hati karena 1000 orang (yang diduga tewas saat Duterte menjadi Wali Kota Davao) akan naik menjadi 100 ribu orang¹.

Pada September 2016, Duterte merencanakan untuk memperpanjang perang melawan narkoba

¹ Tempo. 2018. *5 Poin Soal Perang Narkoba Brutal di Filipina Ala Duterte*. Oktober 16. Accessed April 26, 2019. <https://dunia.tempo.co/read/1136853/5-poin-soal-perang-narkoba-brutal-di-filipina-ala-duterte>.

selama enam bulan. Ia beralasan terlalu banyak orang yang terlibat dalam bisnis narkoba dan Ia tak bisa membunuh mereka semua. Duterte tidak menyadari sebegitu parah dan seriusnya kejahatan narkoba di Filipina hingga Ia menjadi Presiden. Operasi anti-narkoba yang sudah digelar selama ini, kata Duterte seperti mengeluarkan "cacing dari dalam sarangnya" sehingga dia menginginkan waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Bahkan, Duterte menyampaikan bahwa jika waktu operasi ditambah pun tidak bisa membunuh mereka semua karena laporan terakhir akan sangat tebal kata Duterte, merujuk pada daftar terbaru para terduga bandar narkoba yang disusun kepolisian.

Sejauh ini, polisi mengatakan telah menewaskan 1.105 terduga pengedar narkoba selama hampir tiga bulan Duterte berkuasa. Sementara, 2.035 orang lainnya tewas dibunuh orang tak dikenal yang oleh pada aktivis HAM adalah sebuah praktik main hakim sendiri yang didorong seruan Duterte agar warga tidak ragu membunuh para pengedar narkoba. Perang melawan narkoba yang sudah menewaskan ribuan orang ini mengundang banyak kritik termasuk dari PBB, parlemen Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun, Duterte mengabaikan semua kritik itu bahkan tidak jarang mengumbar caci maki termasuk terhadap Presiden AS Barack Obama yang dinilainya mencampuri urusan dalam negeri Filipina².

Akibat kritikan AS terhadap kebijakan *war on drugs* Duterte ini, hubungan diplomatik Filipina dan AS dinilai memburuk, seiring sikap membangkang

² Sandi, Eviera Paramita. 2016. *Perang 'Membabi Buta' Melawan Narkoba di Filipina Diperpanjang*. September 19. Accessed April 26, 2019. <http://bali.tribunnews.com/2016/09/19/perang-membabi-buta-melawan-narkoba-di-filipina-diperpanjang>.

yang ditunjukkan oleh Duterte terkait kritik para pemimpin AS atas kebijakan perang melawan narkoba yang diterapkannya. Sejumlah analis memprediksi Duterte akan berusaha untuk mencari hubungan baik dengan negara lain di luar AS, termasuk dengan musuh maritim AS yaitu Tiongkok. Dalam suatu kesempatan, Duterte memberi sinyal hubungan baik antara Filipina dengan Tiongkok. Di hadapan para pengusaha Tiongkok, Duterte menyebut akan lebih sering mengunjungi Tiongkok pada tahun 2017. Kemungkinan juga, Duterte akan meredam kasus sengketa teritorialnya dengan Tiongkok termasuk soal Pulau Karang Scarborough.

Sebelumnya, Duterte mengancam balik kritikus utamanya, Leila de Lima seorang senator yang memimpin penyelidikan HAM dalam perang narkoba Duterte. Serangan balik Duterte berakhir setelah Ia berhasil menumbangkan De Lima sebagai kepala penyelidikan di Senat. Pada Kamis, 22 September Menteri Kehakiman Filipina Vitaliano Aguirre mengatakan bahwa De Lima akan dikenakan tuntutan atas keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Akibat tuntutan ini bisa membuat De Lima menghabiskan hukuman selama 30 tahun di penjara. De Lima sendiri juga merupakan politikus senior Filipina yang pro terhadap AS³.

Kritikan AS terhadap kebijakan *war on drugs* Duterte juga didukung oleh Senator Francis "Kiko" Pangilinan yang meragukan Duterte akan memenuhi batas waktu tersebut. Kiko bercermin pada kegagalan Duterte mengatasi masalah selama

³ Wirawan, Unggul. 2016. *Hubungan Diplomatik AS-Filipina Memburuk*. September 23. Accessed April 25, 2016. <https://www.beritasatu.com/dunia/387880/hubungan-diplomatik-sfilipina-memburuk>.

menjabat sebagai Wali kota Davao, sebuah posisi yang didudukinya lebih dari dua dekade. Menurut Kiko jika kampanye anti-narkotika di Davao tidak berhasil menekan dan menghilangkan obat bius serta pecandu dibawah kepemimpinan Duterte sebagai walikota selama 24 tahun, lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa kampanye nasional melawan obat-obatan terlarang akan berhasil dalam enam bulan dan diperpanjang untuk enam bulan lagi. Menurut Kiko lagi, apabila kebijakan perang melawan narkoba tidak berhasil menghilangkan ancaman narkoba di area yang lebih kecil (satu kota) selama jangka waktu yang lama (24 tahun). Lalu, apakah kebijakan itu akan berhasil di daerah yang lebih besar (seluruh negara lebih 100 kota dan lebih dari 1.000 kota) dalam waktu yang lebih singkat (3-12 bulan).

2. Kritikan Balik Duterte Terhadap AS

Duterte mengemukakan kritik PBB terhadap perang narkoba (*war on drugs*) yang dijalankannya di Filipina. Duterte menyebut organisasi negara-negara dunia tersebut bodoh dan memperingatkan agar PBB tidak mengganggu kebijakan domestik negaranya. Duterte juga menegaskan bahwa Ia akan terus mendorong perang anti-narkoba meskipun dihujani kritikan, termasuk dari Sekjen PBB langsung Ban Ki-moon. Duterte mempertanyakan :

“Mengapa PBB begitu mudah terombang ambing dalam mencampuri urusan republik ini? Hanya 1.000 orang yang tewas”

Kata Duterte pada acara yang menandai ulang tahun ke-115 Kepolisian Filipina.

Lebih jauh Duterte mengatakan PBB telah membuat preposisi yang sangat bodoh dan

memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam politik negara itu. Ia pun mengatakan kepada para pengawas hak asasi asing untuk tidak melakukan penyelidikan yang dinilainya menjadikan Filipina seolah-olah sebagai penjahat. Ia pun memperingatkan jika mereka tidak akan diperlakukan dengan baik di Filipina. Sebelumnya pada bulan Juni 2016, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam dukungan nyata Duterte atas pembunuhan di luar hukum dengan mengatakan Filipina telah melakukan tindakan ilegal dan pelanggaran hak-hak dasar dan kebebasan.

Sedangkan kantor anti-narkoba PBB mengatakan sangat prihatin dengan laporan pembunuhan di luar hukum terhadap mereka yang diduga menjadi pengedar dan pengguna narkoba di Filipina. Duterte memerintahkan perang berdarah terhadap kejahatan yang telah menewaskan 1.054 orang sejak bulan Mei 2016. Jumlah ini termasuk mereka yang tewas dalam operasi polisi dan lebih dari 400 orang dibunuh secara misterius. Duterte juga berulang kali mengejek aktivis HAM yang menentang pembunuhan. Bukannya melunak, Duterte justru mengkritik PBB karena mengecam serangkaian pembunuhan terhadap para terduga pengedar narkoba di negaranya. Ia bahkan menilai kecaman PBB tidak adil karena lembaga itu tutup mulut soal berbagai kekerasan mematikan di Timur Tengah⁴.

Selain mengkritik balik PBB, Duterte juga mengkritik balik AS dan bahkan berkata pedas

⁴ Berlianto. 2016. *Kritik Perang Narkoba, Presiden Filipina Sebut PBB Bodoh*. Agustus 18. Accessed April 26, 2019. <https://international.sindonews.com/read/1132004/40/kritik-perang-narkoba-presiden-filipina-sebut-pbb-bodoh-1471465785>.

kepada Presiden Barack Obama dengan mengatakan "you can go to hell" atau bisa diartikan 'pergilah ke neraka'. Mantan wali kota Davao tersebut juga mengancam akan memutuskan hubungan dengan AS. Pernyataan tersebut dikeluarkan Duterte ketika AS dan Filipina mulai melakukan latihan militer bersama. Cacian Duterte kepada AS memanas setelah perang melawan narkoba (*war on drugs*) yang dijelankannya mendapat kritik luas. Ribuan orang yang diduga menjadi pengedar dan pengguna narkoba dilaporkan tewas dalam operasi pemberantasan barang haram yang gencar dilakukannya.

Kenaikan angka pembunuhan selama operasi anti-narkoba membahayakan citra Filipina, seperti yang digambarkan media internasional dan beberapa investor menanyakan apakah operasi itu mengurangi aturan hukum kata *American Chamber of Commerce of the Philippines* pada bulan September 2016. Para pejabat AS telah mengecam Duterte, terutama setelah Ia menyamakan dirinya dengan Hitler. Meskipun akhirnya kemudian Duterte meminta maaf atas pernyataannya itu.

Pada Selasa 4 Oktober 2016 Duterte juga mengatakan bahwa dirinya bersedia memutuskan hubungan dengan AS, lalu beralih ke Rusia dan Tiongkok. Menurut Duterte saling menghormati itu penting, jika hal tersebut tidak didapatkan seperti yang terjadi sekarang antara hubungan Filipina dan AS, maka Ia akan mengkonfigurasi ulang kebijakan luar negeri. Akhirnya, mungkin saja Ia akan memutuskan hubungan dengan AS dan Duterte mengatakan bahwa Ia lebih suka membuka hubungan ke Rusia dan Tiongkok ujar Duterte dalam pidatonya.

Menanggapi pernyataan pedas Duterte tersebut, Juru Bicara Gedung Putih John Earnest

mengatakan hal yang diucapkannya bertolak belakang dengan hubungan hangat antara dua negara. Earnest juga mengatakan, AS belum menerima permintaan Filipina untuk mengubah hubungan bilateral mereka. Namun, Ia menegaskan bahwa AS tak ragu untuk meningkatkan perhatian terhadap pembunuhan di luar hukum Filipina yang Ia sebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sementara itu, dalam pidatonya Duterte mengatakan bahwa dirinya tak akan berhenti melakukan perang terhadap narkoba. Menurut Duterte tidak ada hukum apapun yang mengatakan bahwa Ia tak bisa mengancam penjahat sebagai wali kota atau bahkan sebagai presiden ujar Duterte dalam mempertahankan ancaman untuk membunuh para pengedar dan pengguna narkoba⁵.

B. Perbedaan Pandangan Duterte dan AS Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Duterte seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, merupakan sosok yang keras dan tidak ingin didikte oleh siapapun dalam pengambilan kebijakannya baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Hal ini juga berlaku terhadap kebijakan Filipina dalam proses penyelesaian sengketa wilayah dengan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan. Berbeda dengan Presiden sebelumnya yaitu Benigno Aquino III yang sangat bergantung dengan AS dalam penyelesaian sengketa ini, sedangkan AS sendiri juga punya kepentingan sendiri atas Laut China Selatan yang merupakan salah satu jalur perdagangan yang sering dilalui kapal AS. Hal ini lah

⁵ Dewi, Citra. 2016. *Pesan Duterte untuk Obama: Go to Hell*. Oktober 5. Accessed April 27, 2019. <https://www.liputan6.com/global/read/2618359/pesan-duterte-untuk-obama-go-to-hell>.

yang membuat Duterte berpikir ulang tentang penyelesaian sengketa ini, karena Duterte lebih mengedepankan kepentingan Filipina yang utama.

1. Sikap Melunak Duterte Terhadap Tiongkok

Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa dia bukan penggemar AS. Duterte menegaskan akan mengejar kebijakan luar negeri Filipina yang independen. Dia juga menginginkan Filipina menahan diri dari perseteruannya dengan Tiongkok terkait sengketa kawasan Laut China Selatan, meski AS sebagai sekutu Filipina memberikan dukungan untuk Filipina. Duterte memberikan penegasan:

”Saya bukan penggemar Amerika. Rakyat Filipina harus tahu terlebih dahulu sebelum orang lain. Dalam hubungan kami dengan dunia, Filipina akan mengejar kebijakan luar negeri yang independen. Saya ulangi: Filipina akan mengejar kebijakan luar negeri yang independen”

Hal tersebut disampaikan ketika Duterte diwawancarai oleh Inquirer, pada Minggu, 11 September 2016 di Davao, kota yang jadi kampung halamannya.

AS sebagai sekutu utama militer Filipina dan penguasa kolonial Filipina hingga 1946, telah mengkritik tindakan keras brutal Duterte dalam perang melawan narkoba di Filipina. Data terkini, menyebut hampir 3 ribu orang tewas dalam perang melawan narkoba. Pemerintah Presiden Barack Obama telah mendesak Duterte melakukan perang terhadap kejahatan dengan cara yang benar dan melindungi HAM. Namun, kritik AS itu ditanggapi dengan marah

oleh Duterte. Dia mengatakan, apa yang terjadi di negaranya bukan urusan AS⁶.

Ditengah ketegangan hubungan antara AS dan Filipina, Duterte mengambil keputusan agar Filipina dan Tiongkok bersepakat untuk menghindari unjuk kekuatan militer dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Hal tersebut merupakan kesimpulan dalam kesepakatan bersama antara Filipina dan Tiongkok pada saat akhir kunjungan Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang ke Manila pada 15 November 2017. Dengan begitu, ketegangan antara China dan Filipina dalam memperebutkan Laut China Selatan diperkirakan akan meredup. Hubungan kedua negara juga membaik di tengah kepemimpinan Duterte. Malaysia, Taiwan, Brunei, Vietnam, dan Filipina, mengklaim beberapa wilayah di Laut China Selatan yang memiliki pulau dan karang. Namun, Tiongkok mengklaim mayoritas perairan tersebut. Tiongkok juga membangun pulau buatan di Laut China Selatan dengan agresif. Dalam kesepakatan tersebut Filipina dan Tiongkok menegaskan kembali pentingnya perdamaian di Laut China Selatan dan kebebasan navigasi serta penerbangan⁷.

Hal tersebut menjadi pukulan telak bagi AS, selain karena Filipina yang merupakan sekutu utamanya di Kawasan Asia Tenggara tetapi juga menjadi pertanda bahwa AS harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa Laut China Selatan tidak jatuh ke tangan Tiongkok. Merespon hal tersebut,

⁶ Muhaimin. 2016. Duterte: Saya Bukan Penggemar Amerika. Septemver 11. Accessed April 27, 2019. <https://international.sindonews.com/read/1138425/40/duterte-saya-bukan-penggemar-amerika-1473539547>.

⁷ Koran Sindo. 2017. *Soal Laut China Selatan, China-Filipina Sepakat Hindari Konflik*. November 17. Accessed April 28, 2019. <https://international.sindonews.com/read/1258302/40/soal-laut-china-selatan-china-filipina-sepakat-hindari-konflik-1510910586>.

Wakil Presiden AS Mike Pence menegaskan bahwa Laut China Selatan bukanlah milik satu negara dan AS akan terus berlayar dan melintasinya selama hukum internasional tidak melarang hal tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan kepala negara Asia Tenggara, Kamis 15 November 2018, Pence menyatakan tidak ada tempat bagi negara agresif yang mencari kekuasaan di kawasan Indo-Pasifik. Komentar tersebut merujuk pada China yang secara konsisten memperluas pengaruhnya di Laut China Selatan.

Pernyataan terbaru Pence adalah kelanjutan dari pidatonya pada Oktober 2018 yang lalu dan sekaligus menandai dimulainya pendekatan keras AS terhadap Tiongkok. Pence menyebut Tiongkok telah melakukan tindakan jahat untuk memprovokasi AS dan secara sembrono melakukan aksi militer di Laut China Selatan. Sementara itu, Filipina sebagai salah satu negara yang terlibat klaim Laut China Selatan, menyampaikan pihaknya menyadari bahwa Tiongkok telah mengambil alih perairan tersebut. Duterte menambahkan bahwa operasi militer AS dan sekutunya di Laut China Selatan hanya menambah friksi dan memperlambat proses penyelesaian yang tengah dilakukan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya. Duterte melanjutkan konflik di Laut China Selatan hanya dapat diselesaikan melalui pembicaraan antara Tiongkok dan ASEAN serta tanpa campur tangan AS dan sekutunya yang melakukan provokasi melalui latihan militer⁸.

Sebenarnya pada Selasa, 12 Juli 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa Tiongkok telah

⁸ Timorria, Iim Fathimah. 2018. *AS Tegaskan Laut China Selatan Bukan Milik Satu Negara*. November 16. Accessed April 28, 2019. <https://kabar24.bisnis.com/read/20181116/19/860599/as-tegaskan-laut-china-selatan-bukan-milik-satu-negara>.

melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan. Pada keputusan tersebut Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan cara melakukan penangkapan ikan dan eksplorasi minyak, membangun pulau buatan dan tidak melarang para nelayan China bekerja di zona tersebut. Namun Duterte memutuskan bahwa Pemerintah Filipina menegaskan komitmennya untuk mencari resolusi damai dan pengelolaan sengketa sambil tetap mempromosikan dan menegakkan perdamaian serta stabilitas kawasan ketimbang harus menggunakan pendekatan militer terhadap Tiongkok⁹.

2. Pembelaan Duterte Terhadap Tiongkok dalam Forum ASEAN

Organisasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), pada tahun 2017 sebenarnya berpeluang melangsungkan pembahasan mengenai penanganan terhadap ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan yang disengketakan oleh beberapa negara ASEAN dan Filipina sebagai salah satunya. Pada saat itu Filipina menjadi ketua bergilir ASEAN dan memiliki wewenang untuk menetapkan agenda tahun 2017. Presiden Duterte, yang akan mewakili Filipina mengetuai ASEAN berusaha menjauhkan diri dari masalah itu dengan tidak memasukannya dalam agenda pembicaraan. Sebenarnya jika Duterte mencantumkan isu Laut China Selatan dalam agenda pembicaraan, negara-negara yang memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok di Laut China Selatan akan ikut angkat bicara. Namun, kevakuman sikap ASEAN terhadap isu ini memberikan Tiongkok

⁹ Kompas. 2016. *Mahkamah Arbitrase Internasional: China Tak Berhak Klaim Seluruh Laut China Selatan*. Juli 12. Accessed April 28, 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17095071/mahkamah.arbitrase.internasional.china.tak.berhak.klaim.seluruh.laut.china.selatan>.

keyakinan dan mendorong negara itu mengirim sinyal ke AS untuk tidak ikut campur. AS selama ini dipandang sebagai pelindung negara-negara kecil yang memiliki klaim bertentangan dengan China.

Meski demikian, Departemen Luar Negeri Filipina, dalam situsnya, mengatakan, keamanan dan kerjasama maritim adalah salah satu dari enam prioritas utama Duterte pada tahun 2017. Pada saat KTT Asia Timur, September 2016, Duterte juga menghindar untuk tidak menyampaikan kecaman terhadap China menyangkut sengketa maritim. Duterte bahkan belakangan juga dikabarkan, berusaha memperbaiki hubungan dengan China¹⁰.

Filipina dan Tiongkok sepakat untuk tidak menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menyelesaikan ketegangan melalui perundingan dengan negara berdaulat lainnya. Kedua negara juga percaya bahwa ketegangan maritim tidak akan mengganggu hubungan Filipina dan Tiongkok, demikian. Sebelumnya, dalam pernyataan terpisah di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2017, Duterte menegaskan, perlunya peningkatan hubungan antara ASEAN dan Tiongkok dalam isu Laut China Selatan. Duterte menyampaikan bahwa dalam pandangan momentum yang positif, ASEAN harus melihat ke depan tentang pengumuman negosiasi *Code of Conduct (COC)* dengan Tiongkok. Perundingan COC sendiri dilaksanakan pada awal 2018 di Vietnam. ASEAN dan Tiongkok menurut Duterte harus mendiskusikan serangkaian aturan bagaimana menghadapi ketegangan di Laut China Selatan untuk menghindari kecelakaan dan eskalasi konflik. Namun, COC hingga saat ini belum mencapai

¹⁰ VOA Indonesia. (2016, Desember 14). *Sengketa Laut China Selatan Bergantung pada Kepemimpinan Filipina di ASEAN*. Retrieved April 28, 2019, from <https://www.voaindonesia.com/a/sengketa-laut-china-selatan-bergantung-pada-kepemimpinan-filipina-di-asean/3635876.html>

kesepakatan karena perbedaan pandangan dan sikap antara ASEAN dan Tiongkok.

Menurut Duterte kedua belah pihak (ASEAN dan Tiongkok) telah sukses menguji coba *hotline* diantara kementerian luar negeri tentang bagaimana mengelola situasi darurat maritim. Dalam pandangan Duterte, berbagai langkah praktis bisa mengurangi ketegangan dan mengurangi risiko kesalahpahaman dan salah perhitungan dalam isu Laut China Selatan. Baik Li Keqiang maupun Duterte menyatakan kepercayaan diri dalam peningkatan hubungan antara kedua negara akan terus dilanjutkan. Pada Rabu, 15 November 2017, kedua pemimpin itu menandatangani 14 kesepakatan mengenai kerja sama ekonomi, keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Li memperpanjang kunjungan di Manila setelah menghadiri KTT ASEAN ke-31. Duterte mengatakan, kunjungan Li menjadi momentum bagi Filipina untuk menandai lawatan pertama PM Tiongkok ke Manila dalam 10 tahun terakhir. Bagi Duterte ini menunjukkan sisi hebat dimana Filipina dan Tiongkok bisa meningkatkan hubungan bilateral sejak dirinya dilantik menjadi Presiden.

Dalam pertemuan dengan Li, Duterte mengungkapkan dirinya sangat senang dengan momentum membaiknya hubungan kedua negara. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan kepercayaan diri bisa meningkatkan interaksi antara dua pemerintahan. Kerja sama praktis di berbagai bidang bisa membawa keuntungan bagi kedua negara. Dengan bersama-sama, Filipina dan Tiongkok akan mampu mengembangkan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan¹¹.

¹¹ Koran Sindo. (2017, November 17). *Soal Laut China Selatan, China-Filipina Sepakat Hindari Konflik*. Retrieved April 28, 2019, from <https://international.sindonews.com/read/1258302/40/soal-laut-china-selatan-china-filipina-sepakat-hindari-konflik-1510910586>

C. Usaha Duterte Melepaskan Diri Dari Hegemoni AS Terhadap Filipina

Filipina meskipun sudah memperoleh kemerdekaan dari AS sejak tahun 1947, namun pada kenyataannya Filipina belum benar-benar bisa lepas dari pengaruh dan hegemoni dari AS. Ketika Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina pada tahun 2016, Ia menyadari bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan kutub politik, ekonomi, dan militernya. Ada kutub lain yang saat ini menarik banyak Negara-negara berkembang untuk mengarahkan pandangan politiknya kepada kekuatan baru dunia tersebut, Negara tersebut adalah Tiongkok. Dalam beberapa sektor harus diakui bahwa AS telah tersaingi atau bahkan dikalahkan oleh Tiongkok. Duterte yang juga menyadari hal ini tidak ingin melewatkan begitu saja untuk mencoba menjalin hubungan kerja sama dengan Tiongkok untuk kemajuan Filipina, namun berdampak buruk bagi hubungannya dengan AS.

1. Duterte Membuka Peluang Kerjasama Dengan Tiongkok

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendeklarasikan putus hubungan dari AS dan menyatakan kesetiaannya pada Tiongkok setelah kedua negara mengakhiri kemelut tentang Laut Cina Selatan. Dalam kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 2016, Duterte berkesempatan menyampaikan sebuah pidato di Balai Besar Rakyat, di Beijing. Ia menyampaikan bahwa Filipina akan mempererat hubungan dengan Tiongkok dan setelahnya Duterte juga akan berkunjung ke Rusia dan bicara dengan Presiden Vladimir Putin. Duterte akan menyampaikan bahwa ada tiga negara yang kini dimusuhi dunia, yaitu: Tiongkok, Filipina, dan Rusia.

Dalam kesempatan tersebut Duterte mengumumkan perpisahan hubungan dengan AS dan menganggap sekarang AS sudah keok. Pernyataan Duterte ini disambut sorakan hadirin. Turut hadir dalam pidato Duterte malam itu, sebanyak 200 pebisnis Tiongkok dan Filipina serta Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli. Setelah pidato Duterte rampung, Ramon Lopez, Menteri Perdagangan Filipina, menyatakan berbagai jenis kerja sama ekonomi senilai Rp230 triliun siap ditandatangani.

Ketika diminta merespon pernyataan Duterte, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby, mengatakan masih menunggu klarifikasi dari kata "pemutusan hubungan." Bagi AS hal tersebut belum jelas apa arti kata itu dan semua konsekuensinya. Hubungan AS dan Filipina merenggang setelah Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina Juni 2016. Dua bulan sebelumnya, kedua negara tengah membicarakan perluasan kesepakatan Kerjasama Keamanan Tingkat Lanjut. lewat kesepakatan itu, AS bisa memiliki markas militer di Filipina. Pada September 2015, Presiden AS Barack Obama membatalkan lawatannya ke Filipina, setelah Duterte menyebut Obama sebagai "*son of a whore*"¹².

Dalam penyediaan alat pertahanan, Duterte juga menyatakan bahwa Filipina tidak lagi akan menerima peralatan militer bekas dari AS. Hal tersebut disampaikan oleh Duterte kepada para tentara di markas angkatan darat di Pulau Selatan, Mindanao. Duterte tidak mau lagi Filipina membeli peralatan militer bekas ataupun yang diberikan oleh AS. Selama masa jabatannya, selama masa jabatannya Duterte ingin

¹² VICE Australia. (2016, Oktober 21). *Rodrigo Duterte Menyatakan 'Amerika Serikat Sudah Keok' lalu Beralih Mendukung Cina*. Retrieved April 28, 2019, from https://www.vice.com/id_id/article/mgvmv/rodrigo-duterte-menyatakan-amerika-serikat-sudah-keok-dan-beralih-mendukung-cina

semua peralatan Filipina harus yang baru. Duterte mengatakan Ia akan berupaya mendapatkan sistem persenjataan yang baru dan modern bahkan walaupun saya harus mengeluarkan dana berlipat ganda. Ia ingin membeli peralatan seperti pesawat, kapal, pesawat nirawak serta senjata dari Tiongkok dan Rusia. Dimana notabene kedua negara tersebut merupakan saingan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat¹³.

Pasca kunjungannya ke Filipina tahun 2017, Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Keqiang berpandangan telah terjadi peningkatan hubungan positif hubungan Tiongkok dan Filipina. Hal itu diawali dengan kunjungan Duterte ke Tiongkok tahun 2016 yang kemudian mampu memecah ketegangan antara kedua negara. Li berharap Filipina bisa terus melanjutkan kerja sama untuk memperkuat hubungan kedua negara. Li menyatakan bahwa Tiongkok dan Filipina merupakan "negara berkembang" di mana kedua pemerintahan menghadapi tugas berat ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat. Li menegaskan, Tiongkok telah menjadi mitra perdagangan utama bagi Filipina dimana Tiongkok telah mengimpor buah tropis dari Filipina sebanyak 13.000 kapal pada tahun 2016. Sebanyak 14 penerbangan baru juga telah dibuka di antara kedua negara. Li juga berjanji, satu juta wisatawan Tiongkok akan berkunjung ke Filipina hingga akhir tahun 2017¹⁴.

Tiongkok hingga saat ini masih menolak semua putusan Pengadilan Internasional dan menegaskan

¹³ Himawan, A. (2017, Juni 3). *Duterte Tolak Beli Senjata Militer Bekas dari Amerika Serikat*. Retrieved April 28, 2019, from <https://www.suara.com/news/2017/06/03/062131/duterte-tolak-beli-senjata-militer-bekas-dari-amerika-serikat>

¹⁴ Koran Sindo. (2017, November 17). *Soal Laut China Selatan, China-Filipina Sepakat Hindari Konflik*. Retrieved April 28, 2019, from <https://international.sindonews.com/read/1258302/40/soal-laut-china-selatan-china-filipina-sepakat-hindari-konflik-1510910586>

kedaulatannya atas hampir semua wilayah Laut China Selatan, meskipun ada kontra-klaim dari Brunei, Taiwan, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Tiongkok memang lebih senang menggunakan kerangka pembicaraan bilateral dengan masing-masing pihak dalam penyelesaian sengketa. Filipina tadinya menuntut negosiasi yang melibatkan semua pihak, yaitu enam negara yang bersengketa di Laut China Selatan. Namun, akhirnya melunak setelah adanya kunjungan dari Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Keqiang yang membawa angin segar bagi ekonomi Filipina.

Para pengamat telah memperkirakan, dalam konsultasi langsung dengan Filipina, Tiongkok akan punya peluang lebih besar untuk menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya, terutama kepada negara-negara yang secara ekonomi tergantung pada perdagangan dengan Tiongkok. Salah satu pengamat, Charles Jose menerangkan, undangan Tiongkok untuk pembicaraan bilateral bulan Mei 2018 kepada Filipina tidak disertai prasyarat. Bagi Li yang penting adalah Tiongkok menempuh cara damai untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan ini.

Presiden Duterte berulang kali mengatakan, dia tidak ingin pergi berperang dengan Tiongkok soal perbatasan laut. Chales Jose mengatakan, pembicaraan langsung akan menjadi "platform" di mana Filipina bisa mengangkat isu-isu seperti konstruksi pulau buatan yang dilakukan Tiongkok. Kedua negara masih menyusun agenda, tanggal dan tingkat representasi. Charles Jose memuji prakarsa Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa dengan konsultasi. Juru bicara Presiden Duterte, Ernesto Abella, menyambut baik prakarsa baru itu. Ernesto Abella mengatakan melalui mekanisme bilateral ini, saling percaya dan kerja sama maritim akan dibangun dan kesalahpahaman bisa dihindari. Presiden Duterte berulang kali memuji

Tiongkok yang telah meningkatkan hubungan perdagangan Filipina. Bagi Duterte Tiongkok masih mengenalkan kata kehormatan dan apapun yang dikatakan oleh Tiongkok dengan niat baik, maka itu akan benar-benar terjadi¹⁵.

2. Duterte Tertarik Terhadap Proyek *OBOR* (*One Belt One Road*) Tiongkok

Setelah Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan pemisahan hubungan dengan sekutunya yaitu AS, Filipina mendapatkan imbalan atas hubungan bisnis bumper dengan Tiongkok. Duterte pulang dari kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 2016 dengan membawa 24 miliar Dollar Amerika sebagai pinjaman dan komitmen investasi Tiongkok untuk perbaikan infrastruktur yang ambisius dalam proyek *One Belt One Road (OBOR)*. Ketika Presiden Xi Jinping mengunjungi Filipina pada tahun 2017, Duterte membutuhkan pemimpin Tiongkok tersebut untuk menaruh uangnya di tempat yang ia tuju dan membantu Duterte membenarkan konsesi geopolitiknya, menurut Richard Heydarian, seorang analis pertahanan dan keamanan yang berbasis di Manila.

Program infrastruktur Tiongkok merupakan strategi ekonominya yang melibatkan 75 proyek unggulan yang sekitar setengahnya dialokasikan untuk pinjaman, hibah, atau investasi di Filipina. Proyek infrastruktur tersebut termasuk tiga proyek kereta api, tiga jalan raya dan sembilan jembatan, berada di berbagai tingkat perencanaan dan penganggaran, atau sedang menunggu persetujuan pemerintah Tiongkok untuk pembiayaan, atau pencalonan kontraktor Tiongkok.

¹⁵ DW . (2018, Maret 29). *Cina dan Filipina Akan Berunding Soal Laut Cina Selatan*. Retrieved April 28, 2019, from <https://www.dw.com/id/cina-dan-filipina-akan-berunding-soal-laut-cina-selatan/a-38181241>

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan proyek-proyek besar yang disepakati oleh kedua belah pihak berjalan dengan lancar dan terus mencapai hasil positif. Tiongkok ingin meningkatkan perdagangan dan investasi dan mempromosikan dimulainya pembangunan awal proyek yang bahkan lebih disepakati. Investasi Tiongkok yang dilakukan di Filipina pada paruh pertama tahun 2017 sebesar 33 Juta Dollar AS, menurut Otoritas Statistik Filipina, melacak tren yang sama tahun sebelumnya. Perdagangan antara Tiongkok dan Filipina telah meningkat secara signifikan. Ekspor Tiongkok ke Filipina tumbuh 26 persen dalam sembilan bulan pertama 2017 dari periode yang sama tahun sebelumnya, melebihi impornya. Investasi langsung dari Tiongkok ke Filipina telah melonjak menjadi 181 Juta Dollar AS untuk delapan bulan pertama tahun 2018, dari 28,8 Juta Dollar AS untuk tahun 2017, menurut bank sentral Filipina.

Duterte mencari kesepakatan dengan Tiongkok untuk bersama-sama mengeksplorasi gas lepas pantai di Reed Bank yang disengketakan di jalur air yang kaya sumber daya dan strategis. Beberapa anggota Parlemen Filipina sempat khawatir bahwa hal itu sama saja dengan mengakui klaim Beijing atas sebuah situs yang menurut keputusan PCA mengatakan China tidak memiliki hak berdaulat di bawah hukum internasional. Duterte juga menentang negara-negara Asia Tenggara yang bersatu melawan militerisasi China dan pada pertemuan puncak regional pekan lalu, ia memperingatkan agar tidak menimbulkan gesekan, karena Laut Cina Selatan¹⁶.

¹⁶ LEMA, K., & PETTY, M. (2018, November 19). *Two years after Philippines 'divorced' U.S., President Rodrigo Duterte still waiting on China dividend*. Retrieved April 28, 2019, from <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/19/asia-pacific/politics->

Menjelang keberangkatannya ke Forum *'The Belt and Road'* untuk Kerja Sama Internasional (BRF) di Tiongkok pada tahun 2017, Presiden Duterte menyatakan inisiatif *One Belt One Road (OBOR)* sangat sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur yang diajukan pemerintah Filipina, sehingga ruang kerja sama kedua negara sangat luas. Inisiatif OBOR diyakini akan memperluas hubungan ekonomi dan dagang kedua negara dan menyejahterakan rakyat Filipina.

Duterte ketika menerima liputan media Tiongkok di Manila pada hari Selasa, 9 Mei 2017, mengatakan, Ia menaruh harapan pada penyelenggaraan BRF. Ia mengatakan, Filipina sebagai sebuah negara berkembang membutuhkan konektivitas dengan negara-negara lain di kawasannya demi menjamin pertumbuhan sehat ekonominya. Titik tolak inisiatif OBOR adalah ekonomi, dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar berbagai negara sehingga berbagai pihak dapat mendapat keuntungan dari pertumbuhan perdagangan dan pasar.

Duterte mengatakan, Ia yakin inisiatif OBOR akan memperluas hubungan ekonomi dan dagang Filipina dan Tiongkok, sehingga pada akhirnya mendatangkan keuntungan kepada rakyat Filipina. Ia menyatakan pula, partisipasi dalam inisiatif OBOR selain dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan dagang dengan Tiongkok, Filipina juga dapat mengambil pengalaman pembangunan negara-negara lain, khususnya manfaat ekonomi yang didatangkan inisiatif OBOR dan pengalaman mengenai cara menghadapi tantangan ekonomi global.

Menyinggung bagaimana Filipina dan Tiongkok meningkatkan kerja sama dalam kerangka OBOR, Duterte mengatakan, OBOR sangat sesuai dengan rencana pembangunan 2017-2022 yang tengah dilaksanakan Filipina, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Inisiatif itu sesuai dengan target era emas pembangunan infrastruktur yang dikemukakan pemerintah Filipina, maka ruang kerja sama kedua negara sangat besar.

Filipina merupakan Ketua Bergilir ASEAN tahun 2017. Duterte mengatakan, Ia akan menghadiri BRF atas nama presiden Filipina, sekaligus mewakili ASEAN. Ia mengatakan hubungan ASEAN-Tiongkok kini memasuki tahap baru, dan OBOR akan menghapuskan rintangan dan memuluskan jalan bagi ASEAN dan Tiongkok untuk melakukan lebih banyak hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, guna mendorong kedua pihak menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat, sehingga meningkatkan taraf kehidupan rakyat di kawasan. Ia optimis terhadap masa depan OBOR dan percaya inisiatif tersebut akan meningkatkan lebih lanjut kerja sama ASEAN-Tiongkok¹⁷.

¹⁷ China News. (2017, Mei 12). *Rodrigo Duterte: Inisiatif 'One Belt One Road' Bakal Perluas Hubungan Ekonomi dan Dagang Filipina-Tiongkok*. Retrieved April 28, 2019, from <http://indonesian.china.com/news/asia/985/20170512/963892.html>